

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Sumur Resapan Berperan Penting Tanggulangi Banjir

INDOPOSCO - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan sumur resapan memiliki peran penting dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota karena dapat mempercepat surutnya genangan.

"Sumur resapan ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap penanganan banjir, yakni mempercepat surutnya genangan," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/10).

Setelah dirinya pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang, Riza menyatakan keberlanjutan program sumur resapan ini akan menjadi kewenangan sepenuhnya dari pejabat gubernur DKI Jakarta.

Pihaknya, kata dia, tidak memiliki wewenang lagi untuk melakukan intervensi kelanjutan sumur resapan.

"Kami tidak ingin mengintervensi pejabat gubernur. Pejabat gubernur punya keleluasaan, punya kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik, bagaimana Pemprov DKI Jakarta ke depan," imbuh Riza, dikutip dari Antara.

Meski begitu, sebelumnya Gubernur Anies Baswedan mengharapkan agar

program-program pembangunan yang sudah disusun termasuk pengadaan bangunan-bangunan pengendali banjir dapat dilanjutkan.

Apalagi sumur resapan sudah masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meski anggarannya sempat dicoret DPRD DKI Jakarta karena dinilai tidak efektif.

Program sumur resapan pengendali banjir tertuang dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2022 tentang RDTR.

"Teman-teman DPRD kan sampai hari ini belum menyetujui memang itu nanti 'kan masih pembahasan. Pembahasan nanti kan pada pejabat gubernur tentang program untuk 2023, pembahasan anggaran kami sekarang ini sudah menyiapkan," ujarnya.

Terkait sumur resapan, DPRD DKI mencoret anggaran program itu pada 2022.

Awalnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp330 miliar kepada DPRD DKI pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Sebelum dibawa ke rapat

Badan Anggaran DPRD DKI, usulan anggaran itu kemudian diturunkan menjadi Rp120 miliar.

Namun, saat pembahasan di Badan Anggaran, usulan tersebut dicoret alias dihapus karena program itu dinilai tidak efektif menekan banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun setidaknya 16 ribu sumur resapan pada 2021, namun sebagian di antaranya menuai kritik karena penempatan yang dinilai tidak tepat dan desain teknis yang tidak sesuai standar. (arm)